

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PENGETAHUAN
DEWAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAH (APBD)
(Studi Empiris Pada DPRD Kota Pati Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh :

KRISNA

B200100097

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax. 715448 Surakarta 57102
Website: <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir :

Nama : **Dr. Erma Setyawati, MM, Ak**

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/ tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : **KRISNA**

NIM : **B200100097**

Program Studi : **EKONOMI DAN BISNIS**

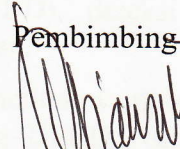
Judul Skripsi : **PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PENGETAHUAN DEWAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota Pati Jawa Tengah)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, Maret 2014

Pembimbing,


Dr. Erma Setyawati,
MM, Ak

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK, DAN PENGETAHUAN
DEWAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAH (APBD)
(Studi Empiris Pada DPRD Kota Pati Jawa Tengah)**

KRISNA

B200100097

Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email : krisna569@yahoo.com

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan anggaran. Partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagai pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan. Pengetahuan dewan adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan metode sampel jenuh terhadap anggota DPRD Kota Pati periode 2009-2014, kemudian dianalisis dengan uji regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (2) partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (3) transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (4) pengetahuan dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD.

Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan dan Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran diumumkan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi) anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah, 2004).

Disamping itu, diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah juga diikuti dengan pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah yang diikuti pula pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 2003). Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru dalam pengawasan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik (Mardiasmo, 2003 dalam Widyaningsih).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Mardiasmo, 2001 dalam Sopanah dan Wahyudi).

Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan anggaran keuangan daerah. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Publik dan Pengawasan keuangan Daerah

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Hal ini juga di dukung oleh pendapatnya Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan (Sopanah dan Wahyudi, 2008).

H1: Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD)

2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber energi dalam penyelenggaraan pemerintah, maka peranan Dewan dalam melakukan

pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah (Sopannah dan Wahyudi, 2008).

H2: *Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD)*

3. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Asumsi yang dapat dirumuskan bahwa semakin transparansi kebijakan publik dalam mengenai APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut (Coryanata, 2007).

H3: *Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD)*

4. Pengetahuan Dewan dan Pengawasan keuangan Daerah

Bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan

pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran (Yudono, 2002 dalam Coryanata 2007).

H4: *Pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD)*

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap anggota DPRD kota pati periode 2009-2014. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi empiris dan *interview* pada pihak/instansi terkait untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota DPRD Kota Pati periode 2009-2014, yang berjumlah 40 orang anggota yang terdiri dari 4 komisi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*, metode sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel (Chabib, 2004).

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrument kuisisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuisisioner secara langsung ke kantor DPRD Kota Pati.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Publik ini adalah sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban Pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.
- b) Pengawasan APBD melibatkan masyarakat.
- c) Renstrada dan Arah Kebijakan Umum dalam pengawasan APBD.
- d) Kepentingan publik dan golongan dalam pengawasan APBD.
- e) APBD merupakan barang rahasia.
- f) Kinerja untuk mengevaluasi APBD.
- g) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD secara kontinue.
- h) Penyajian APBD harus menyertakan informasi.
- i) Dalam mengevaluasi APBD memperbandingkan anggaran dengan realisasinya.

2. Partisipasi Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pengawasan APBD melibatkan masyarakat.
- b) Prioritas dan rencana mempertimbangkan saran dan kritikan masyarakat.
- c) Konsultasi dan konfirmasi rancangan APBD.
- d) Mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian anggaran kepada masyarakat.

3. Transparansi Kebijakan Publik

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang kebijakan anggaran.
- b) Kemudahan dokumen-dokumen yang mudah diakses masyarakat.
- c) Pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- d) Usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam pengawasan anggaran.

4. Pengetahuan Dewan

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Dewan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan terhadap pengawasan APBD.

- b) Pengetahuan untuk mengukur efektifitas dan efisien APBD.
- c) Pengetahuan untuk menganalisa kebutuhan masyarakat/prioritas progam kerja.
- d) Pengetahuan untuk melakukan pengawasan terjadinya kebocoran dan kegagalan APBD.

5. Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengawasan Anggaran keuangan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a) Keterlibatan dewan dalam pengawasan APBD.
- b) Pelaksanaan analisis politik terhadap pengawasan APBD.
- c) Kemampuan menjelaskan APBD yang disusun.
- d) Keyakinan dewan bahwa APBD telah memiliki transparansi.
- e) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah daerah.
- f) Evaluasi faktor-faktor atau alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.
- g) Permintaan keterangan laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.

E. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PKD = \alpha + \beta_1 AP + \beta_2 PM + \beta_3 TKP + \beta_4 PD + e$$

Keterangan:

PKD: Pengawasan Keuangan daerah

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

AP: Akuntabilitas Publik

PM: Partisipasi Masyarakat

TKP: Transparansi Kebijakan Publik

PD: Pengetahuan Dewan

e : error

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Deskripsi Responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Wanita	9	22,5%
Pria	31	77,5%
Jumlah	40	100%
SLTA / sederajat	7	17,5%
Akademi / D3	7	17,5%
S1	20	50%
S2	6	15%
S3	-	-
Jumlah	40	100,00%
<30	4	10%
31-40	10	25%
41-50	22	55%
>51	4	10%
Jumlah	40	100,00%

B. Uji validitas dan Uji Reabilitas

Hasil pengujian validitas dengan metode *Pearson Correlation* menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan Valid yang memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,312). Sedangkan hasil pengujian Realibilitas pada tabel menunjukkan bahwa semua kuesioner dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa semua instrumen menunjukkan penelitian ini adalah reliabel.

C. Asumsi Klasik

Uji Multikoloniaritas

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki *tolerance* lebih dari 0,1 ($>0,1$) dan semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 (<10). Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Kolmogrov-smirnov sebesar 0,600 dan nilai p -value sebesar 0,864 yang lebih besar dari $\alpha + 0,05$ ($0,864 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi terdistribusi normal.

Uji Heterosdastisitas

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan

bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

D. Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda yang dapat disusun sebagai berikut :

$$\text{PKD} = -6,532 + 0,171\text{AP} + 0,605\text{PM} + 0,484\text{TKP} + 0,465\text{PD} + e$$

E. Uji F

Besarnya nilai F hitung adalah 5,724 dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ berarti model penelitian ini sudah fix.

F. Uji t dan Hipotesis

Akuntabilitas publik diketahui nilai t_{hitung} (1,915) lebih besar daripada t_{tabel} (1,684), tetapi jika dilihat dari nilai signifikansi $0,064 > \alpha = 0,05$ maka, H_1 ditolak artinya akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Partisipasi masyarakat diketahui nilai t_{hitung} (3,008) lebih besar daripada t_{tabel} (1,684) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,005 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 diterima artinya partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Transparansi kebijakan publik diketahui nilai t_{hitung} (2,385) lebih besar daripada t_{tabel} (1,684) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,023 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 diterima artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan dewan diketahui nilai t_{hitung} (2,204) lebih besar daripada t_{tabel} (1,684) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,034 < \alpha = 0,05$. Oleh karena

itu, H_4 diterima artinya pengetahuan dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

G. Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas publik Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H_1 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) diketahui nilai t_{hitung} (1,915) tetapi jika dilihat dari nilai signifikansi $0,064 > \alpha = 0,05$ maka H_1 ditolak, disebabkan kurangnya partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD).

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H_2 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) diketahui nilai t_{hitung} (3,008) dan nilai signifikansi $0,005 < \alpha = 0,05$ maka H_2 diterima, disebabkan adanya pengawasan arah dan kebijakan dari dewan untuk mengakomodasikan usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian anggaran kepada masyarakat.

3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H_3 transparansi

kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) diketahui nilai t_{hitung} (2,385) dan nilai signifikansi $0,023 < \alpha = 0,05$ maka H_3 diterima, disebabkan adanya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat, kemudahan masyarakat mengakses dokumen publik tentang anggaran dan laporan pertanggung jawaban tahunan tepat waktu.

4. Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap H_4 pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) diketahui nilai t_{hitung} (2,204) dan nilai signifikansi $0,034 < \alpha = 0,05$ maka H_4 diterima, disebabkan peranan dewan melakukan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Variabel akuntabilitas publik diketahui nilai t_{hitung} (1,915) tetapi jika dilihat dari nilai signifikansi $0,064 > \alpha = 0,05$ maka H_1 ditolak. Artinya akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai t_{hitung} (3,008) dan nilai signifikansi $0,005 < \alpha = 0,05$ maka H_2 diterima. Artinya partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan

keuangan daerah (APBD).

3. Variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai t_{hitung} (2,385) dan nilai signifikansi $0,023 < \alpha = 0,05$ maka H_3 diterima artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
4. Variabel pengetahuan dewan diketahui nilai t_{hitung} (2,204) dan nilai signifikansi $0,034 < \alpha = 0,05$ maka H_4 diterima artinya pengetahuan dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

B. Keterbatasan

Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu wilayah DPRD yaitu DPRD Kota Pati, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.

C. Saran

Agar Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat mewujudkan asas efektif, efisien dan ekonomis maka akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan perlu ditingkatkan dan tidak hanya dalam mekanisme semu.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, Arif. 2012. *Pengaruh Partisipasi masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota Surakarta Jawa Tengah)*, universitas muhammadiyah Surakarta: Fakultas Ekonomi. Skripsi.

Mustofa, Chabib. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Modul.

- Mayasari, Rosalia. 2009. *“Pengaruh Kualitas anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating”*. Universitas Tridianti Palembang.
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andy. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret. MEP UGM:Jogjakarta.
- Nunnaly, 1967, *Psychometric Theory*, McGraw-Hill, New York.
- Pramono, Agus H., 2002, *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rahmawati, Arini Ayu. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi kebijakan publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Pada DPRD Kabupaten Sukoharjo)*. Fakultas Ekonomi:UMS. Skripsi.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- _____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2005.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*.

- Rubin, Irene, 1996, Budgetting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Summer, hal. 112-132.
- Santoso, Singgih. 2003. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Setyawati, Yuni. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Tesis. Fakultas Ekonomi: UNS.
- Sopannah dan Mardiasmo, 2003, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Sopannah, 2004, *Menyoal Anggaran Publik*, dalam *Pesangon Gate*, Bulletin Suara Korban, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa, 2008, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Malang Corruption Watch (MCW), SNA XIII.
- Sulistoni, G., 2003, *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, SOMASI, Nusa Tenggara Barat.
- Utomo, Hari. 2011. *Determinasi hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan dewan pada keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Diponegoro:Semarang.
- Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. *Jurnal WRA*, Vol. 1, NO.1. Fakultas Ekonomi: UNP.
- Widyaningsih, Aristanti dan Pujirahayu, Imanier. 2012. “*Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating*”. Falkultas Ekonomi dan Bisnis:UPI.

- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Bacground, Political Bacground, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 2006)*. Universitas Sebelas Maret, SNA X.
- Werimon, Simson, Ghozali, Imam, dan Nazir, Mohamad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Propinsi Papua)*, SNA X.
- Wulandari, Trini dan Deviani. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik. Jurnal WRA*, Vol.1 No.2. Fakultas Ekonomi: UNP.
- Yudoyono, Bambang, 2002, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.htm>.
- Yuriyuda. 2010. *MSI (Method of Successive Interval) Langkah Manual dan Software*. www.carabineri.wordpress.com. Diakses tanggal 10 Juni 2011.
- Zainuddin dkk., *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2002.